

BANDWAGONING BRUNEI DARUSSALAM TERHADAP REPUBLIK RAKYAT CINA PADA TAHUN 2018 DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN

Yehuda Bimo Yudanto Purwantoro Putro
Universitas Indonesia
e-mail : yhdbim@gmail.com

Abstract

The South China Sea dispute involves People's Republic of China (PRC) against Vietnam, Malaysia, Philippines, Indonesia, and Brunei Darussalam. The South China Sea Dispute was caused by claimant state and nine dashed line which made by PRC. Instead of resist, Brunei Darussalam in South China Sea Conflict took considerable different gesture other than the rest belligerent parties like Vietnam, Malaysia, Philippines, and Indonesia. Brunei did not show any resistance to PRC regarding territorial claimants and instead cooperates with Asian giants controversial move. Brunei Darussalam took a stand by bandwagoning against the PRC. Brunei's behaviour was identified by Balance of Threat theory by Stephen Walt. As a result, there is a very unbalanced capability and power capacity measure between the combined power capacity of Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia, the Philippines, and Indonesia with PRC. It made worse by the Brunei's economic crisis.

Keywords: South China Sea; Brunei Darussalam; People Republic of China; Bandwagoning.

Abstrak

Konflik Laut Cina Selatan melibatkan Republik Rakyat Cina (RRC) dengan Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan termasuk Brunei Darussalam. Konflik Laut Cina Selatan disebabkan oleh *claimant state* dan pembuatan sembilan garis putus-putus (*nine dashed line*) secara sepihak oleh RRC. Dalam menyikapi agresifitas RRC yang mengklaim wilayahnya di Laut Cina Selatan, Brunei Darussalam mengambil sikap yang berbeda dibanding yang dilakukan oleh Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Brunei Darussalam mengambil sikap dengan tidak menentang klaim RRC dan melakukan *bandwagoning* terhadap RRC. Sikap *bandwagoning* yang dilakukan Brunei Darussalam disebabkan oleh tiga kondisi negara dan empat faktor ancaman dalam teori *Balance of Threat* Stephen Walt, dimana ukuran kapabilitas dan kapasitas kekuatan yang sangat tidak berimbang antara Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia dengan RRC, bahkan jika kekuatan lima negara tersebut digabungkan. Kondisi tersebut ditambah dengan krisis ekonomi yang dialami Brunei Darussalam sehingga *bandwagoning* dianggap sebagai pilihan yang rasional.

Kata Kunci: Laut Cina Selatan; Brunei Darussalam; Republik Rakyat Cina; *Bandwagoning*.

Pendahuluan

Dalam hubungan internasional, sistem internasional muncul sebagai hasil dari interaksi antara aktor-aktor internasional yang bergerak secara dinamis. Hal ini membuat negara harus menolong dan mempertahankan dirinya sendiri (*self-help*) karena pada dasarnya negara-negara di dunia saling bersaing satu sama lain. Adapun pandangan ini berakar dari konsep dalam paradigma realisme yang menyatakan bahwa permasalahan utama bagi negara sebagai aktor rasional adalah bertahan hidup yang dicapai dengan cara membangun kapabilitas, terutama kapabilitas militer sebagai penunjang keamanan. (Donnelly, 2008:150). Dalam sistem internasional yang anarki, keamanan dan kedaulatan adalah prioritas dari setiap negara. (Burke, 2016:163). Kondisi ini membuat negara-negara akan saling berlomba untuk meningkatkan kapabilitas militernya untuk *survive* dalam sistem internasional yang berakibat pada munculnya *security dilemma*. Pada intinya, *security dilemma* adalah keadaan yang timbul ketika suatu negara merasa terancam dan kemudian meningkatkan

kapabilitas militernya sebagai reaksi peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh negara lain. (Barry Buzzan & Ole Weiver, 2013)

Menurut paradigma realisme, *power* merupakan pusat dari perilaku setiap negara dalam sistem internasional. Realis berasumsi bahwa negara-negara berusaha untuk memaksimalkan *power* yang dimiliki untuk mencapai tujuan-tujuannya (Umar Suryadi, 2017:90). Selaras dengan keinginan negara untuk *survive* dalam sistem internasional, maka setiap negara berlomba-lomba mencari *power* (Morgenthau, 1993:3). Dapat dikatakan bahwa tujuan utama setiap tindakan negara adalah untuk memperoleh *power* (Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani, 2005:13). Dalam sistem internasional, *power* merupakan kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi atau mengontrol negara lain untuk mendapatkan atau mempertahankan tujuan negara yaitu harga diri (*prestige*), wilayah, dan keamanan dengan menggunakan pengaruh, persuasi, ancaman, dan *use of force* melalui kekuatan militer (Martin Griffiths & Terry O'Callaghan, 2002:253). Negara yang memiliki *power*

lebih besar akan cenderung untuk mengontrol negara lain dan melahirkan dominasi dan kepemimpinan intelektual (Gramsci, 1999). Dominasi yang dimaksud oleh Gramsci disebut dengan hegemoni. Menurut Gramsci, hegemoni dan dominasi merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan karena konsep hegemoni berbicara tentang dua konsep, yaitu kepemimpinan dan dominasi. Kedua konsep ini mengimplikasikan tiga hal, yaitu kekuasaan dan dominasi suatu negara, penaklukan terhadap pemerintahan bangsa lain, dan kepemimpinan serta dominasi yang terus berlanjut (Nezar Patria & Andi Arif, 2015:117-118).

Dalam koridor sistem internasional, Mearsheimer mengartikan hegemoni sebagai dominasi satu negara yang disebut *great power* terhadap negara-negara lainnya dalam keseluruhan sistem internasional. Negara *great power* adalah negara yang memiliki *power* lebih besar dari negara-negara lainnya serta memiliki dominasi di kawasan dengan *power* relatif-nya tersebut. Beberapa komponen *power* relatif yang harus dimiliki oleh negara *great power* adalah kekuatan militer yang kuat, perekonomian yang

kuat sebagai tumpuan utama dalam membangun kekuatan militer, memiliki nuklir, dan harus mendominasi institusi internasional karena institusi internasional merupakan lembaga yang mempunyai legitimasi atas perilaku negara (Mearsheimer, 2011). Hegemoni tercapai melalui kepemilikan superioritas atas akses berbagai sumber kekuatan yang menghasilkan satu negara sebagai sebuah hegemon yang memiliki *structural power*.

Oleh karena ketidakpastian dalam sistem internasional, negara *great power* selalu berusaha untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan terhadap negara-negara lain. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan *power* relatif yang dimiliki. Menurut Mearsheimer, terdapat empat cara yang dilakukan negara *great power* untuk memaksimalkan *power* relatif-nya. Cara pertama adalah dengan perang sebagai strategi yang paling utama. Cara kedua adalah *blackmail*. Strategi ini mengandalkan ancaman kemampuan militer secara tidak langsung untuk mencapai suatu hasil tanpa membutuhkan biaya. Cara *blackmail* akan dilakukan negara *great power* ketika menghadapi negara yang *power* relatif-nya berada jauh

di bawahnya. Kemudian cara ketiga adalah *bait and bleed* sebagai bentuk strategi untuk melemahkan lawan dengan memproyeksikan ancaman perang jangka panjang yang akan memakan banyak biaya dan sumber daya yang lain termasuk kemampuan militer. Cara terakhir adalah *bloodletting*, yaitu strategi yang membiarkan peperangan terjadi di antara musuh tanpa ikut serta (*proxy war*) (Mearsheimer, 2011:30-32).

Perilaku negara *great power* tersebut dapat dijelaskan dengan pendekatan *offensive realism*. *Offensive realism* berpandangan bahwa menjadi hegemoni adalah cara negara *great power* untuk *survive* dalam sistem internasional. Pendekatan *offensive realism* memiliki asumsi yang berbeda dengan *defensive realism*. Menurut Waltz, pendekatan *defensive realism* memandang bahwa merupakan hal yang tidak bijaksana bagi suatu negara untuk mencoba memaksimalkan *power* mereka dalam kekuatan dunia, karena sistem akan menghukum mereka jika mereka mencoba untuk mendapatkan *power* yang terlalu banyak (Peter Toft, 2005). *Defensive realism* berpandangan bahwa negara *great power* cenderung akan lebih

mempertahankan *status quo* dibanding harus menjadi hegemoni. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa harga bayar serta resiko untuk mendapatkan *power* dan menjadi hegemoni terlampau besar (Waltz, 1979).

Di Asia, Republik Rakyat Cina (RRC) merupakan negara *great power*. Pasca Perang Dingin, RRC menjadi kekuatan baru di Asia sejak runtuhnya Uni Soviet yang membuat RRC menjadi aktor dominan bersama Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia. Hal ini beriringan dengan peningkatan ekonomi dan militer RRC yang signifikan sejak tiga dekade terakhir (Yanyan Mochamad Yani, 2010). Berdasarkan pendekatan *offensive realism*, RRC yang pada saat ini berstatus sebagai negara *great power* berupaya menjadi *regional hegemon*. Premis ini berangkat dari asumsi keunggulan sebagai hegemon adalah jalan terbaik untuk menjamin terciptanya sistem yang mendukung untuk pencapaian berbagai kepentingan bagi negara *great power* tersebut (Mearsheimer, 2001).

Dalam pendekatan *offensive realism*, keberlangsungan dan keselamatan negara merupakan prioritas

utama bagi setiap negara (Mearsheimer, 2001). Dengan demikian kedaulatan negara dan keutuhan wilayah merupakan hal mutlak yang harus dipertahankan sebagai bagian *survival* RRC dalam sistem internasional. Berdasarkan pendekatan offensive realism tersebut, dapat diidentifikasi bahwa RRC berusaha untuk mengklaim beberapa bagian Laut Cina Selatan demi tujuan *survival*-nya, meski harus bersinggungan langsung dengan batas laut beberapa negara Asia Tenggara. Sejak tahun 1947, RRC (pada tahun 1947 masih bernama Republik Cina) telah memulai *claimant state* dan *nine dashed line* (Djelantik, 2015). *Claimant state* merupakan klaim atas kepemilikan pulau-pulau kecil di wilayah Laut Cina Selatan, seperti Kepulauan Spratly dan Paracels yang diperebutkan dengan Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Sementara itu, *nine dashed line* merupakan garis demarkasi atau garis batas pemisah yang digunakan pemerintah RRC untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan klaim historis. Garis ini kemudian yang menimbulkan sengketa wilayah laut dengan Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Brunei

Darussalam. Seiring dengan kebangkitan ekonomi RRC pada awal medio 1980-an yang membuat RRC menjadi kekuatan besar di Asia, RRC kembali menegaskan *nine dashed line* pada tahun 1993 yang membuat konflik Laut Cina Selatan masih terus berlangsung hingga saat ini (Kusumadewi, 2016).

Adapun yang menjadi dasar dari klaim *nine dashed line* RRC adalah alasan historis. RRC beranggapan bahwa wilayah yang diklaim melalui *nine dashed line* merupakan wilayah miliknya sejak zaman dahulu. Terkait dengan klaim historis, hal ini bertentangan dengan UNCLOS 1982 yang tidak menyertakan klaim historis sebagai dasar kepemilikan wilayah atau teritori (BBC Indonesia, 2018). Faktanya, RRC merupakan negara anggota UNCLOS 1982. Berdasarkan *Article (2 (1)(g))* Konvensi Wina 1969, yang dimaksud anggota atau negara pihak adalah negara yang menyatakan dirinya terikat pada perjanjian dan karenanya perjanjian tersebut berlaku padanya (*a state which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force*). Namun demikian, RRC telah melanggar dan tidak mematuhi UNCLOS 1982

meskipun RRC merupakan salah satu negara yang menandatangani UNCLOS 1982.

Tindakan RRC dengan *claimant state* dan *nine dashed line* membuat Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia sebagai negara-negara yang bersengketa dengan RRC di Laut Cina Selatan masing-masing membuat sikap menentang tindakan RRC yang mengganggu teritori laut masing-masing negara tersebut melalui pernyataan pihak pemerintah masing-masing (Rehia Sebayang, 2020). Selain itu, terdapat tren peningkatan kapabilitas armada laut serta peningkatan anggaran militer hingga 47 persen dari keempat negara tersebut sejak tahun 2007 hingga 2016 (*Stockholm Internasional Peace Research Institute*, 2017), khususnya pada sektor angkatan laut. Meski belum memiliki sikap kolektif, namun peningkatan kekuatan militer mempertegas sikap negara-negara tersebut terhadap klaim RRC di teritori laut mereka.

Adapun objek sengketa yang melibatkan Brunei Darussalam dalam konflik Laut Cina Selatan adalah Pulau Louisa Reef yang juga diklaim oleh RRC. Brunei Darussalam mengklaim Louisa

Reef pada tahun 1988 dengan merilis peta resmi yang menyatakan bahwa Louisa Reef adalah bagian dari wilayah landasan kontinental Brunei Darussalam (Gary Sands, 2016). Kemudian pada tahun 1992, pulau tersebut diklaim oleh RRC sebagai bagian dari wilayahnya melalui *nine dashed line*. Meski Brunei Darussalam telah menandai pulau Louisa Reef sebagai bagian teritorinya dengan cara meletakkan batu sebagai tanda, RRC tetap bersikukuh dengan klaimnya hingga saat ini (Haller-Trost, 1994:48).

Sejak Pulau Louisa Reef diklaim oleh RRC pada tahun 1992, Brunei Darussalam tidak pernah menunjukkan sikap menentang klaim RRC tersebut (Gary Sands, 2016). Sepanjang itu pula, Brunei tidak pernah menunjukkan kekuatan militernya di area yang menjadi objek sengketa (Odgaard, 2003:18). Ketika Brunei Darussalam menjadi ketua ASEAN pada tahun 2013, Brunei Darussalam menunjukkan sikap netral dengan mendukung prinsip *shelving disputes and pursuing joint development* yang diusung oleh RRC dan menghindari kebijakan konfrontatif. Pada bulan Desember 2013, misalnya, Brunei Darussalam menolak untuk menghadiri

pertemuan informal yang diadakan Filipina bersama dengan negara-negara anggota ASEAN yang memiliki klaim di Laut Cina Selatan. Selain itu, Brunei memutuskan untuk tidak mengadakan pertemuan anggota ASEAN guna membahas isu-isu penting selama satu tahun terakhir lantaran Brunei Darussalam tidak ingin jika permasalahan Laut Cina Selatan akan menjadi topik utama dan memicu konfrontasi dengan RRC (Zhida, 2013).

Sikap Brunei Darussalam yang tidak menentang klaim RRC menjadi anomali, mengingat jika dilihat dari *power* relatifnya (ekonomi dan militer), meski secara militer Brunei tidak memiliki kekuatan militer yang mumpuni, namun Brunei Darussalam merupakan negara kaya dengan perekonomian yang baik. Brunei Darussalam juga merupakan negara anggota OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*) yang merupakan organisasi negara pengekspor minyak bumi.

Sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1984, Brunei Darussalam menerapkan sistem ekonomi terbuka, namun tidak pernah bersekutu secara politik dan ekonomi dengan negara

manapun sejak era Perang Dingin hingga pasca Perang Dingin (Munthe Salman, 2015:108). Hal ini dikarenakan Brunei Darussalam merupakan negara yang kaya akan minyak bumi dan gas (migas). Sebagian besar pendapatan negara ini berasal dari industri terutama industri migas dan pengolahannya. Keadaan tersebut membuat Brunei Darussalam memiliki ketergantungan yang tinggi akan migas. Sebanyak 95 persen komoditas ekspor Brunei Darussalam adalah migas. Migas pun menyumbang 90 persen pendapatan pemerintah, jauh lebih besar ketimbang pemasukan dari jasa, konstruksi, agrikultur, dan bidang-bidang lainnya (Akhmad Muawal Hasan, 2018).

Meski mengalami penurunan dalam hal pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2018 Brunei Darussalam masih menempati peringkat ke-9 Asia dan peringkat ke-33 dunia dalam kategori negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, lebih tinggi jika dibandingkan dengan Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia (*Trading Economics*, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa Brunei Darussalam masih memiliki *power* relatif yang kuat, bahkan

melebihi Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia dalam hal kekuatan ekonomi, sehingga Brunei Darussalam memiliki kapabilitas yang sama dengan keempat negara tersebut untuk bersikap menentang klaim RRC.

Kajian terdahulu mengenai topik seputar Brunei Darussalam dan RRC serta hubungannya dengan konflik Laut Cina Selatan pada umumnya mengangkat tiga isu besar, yaitu 1) Perilaku negara (*state behaviour*) ketika menghadapi ancaman; 2) Kebijakan RRC di Laut Cina Selatan; dan 3) Sikap negara-negara ASEAN dalam konflik laut Cina Selatan. Kelompok kajian pertama berfokus pada perilaku yang dilakukan oleh negara ketika menghadapi ancaman, terutama negara *small power* yang berhadapan dengan negara *great power*, serta faktor-faktor yang terkait dengan perilaku negara tersebut (Mao Thang, 2018). Kelompok kajian kedua berfokus kepada tujuan RRC di Laut Cina Selatan melalui *offensive realism* yang memandang RRC sebagai *great power* pencari hegemoni (Storey & Cheng-Yi Lin, 2016:228). Kemudian kajian ketiga berfokus pada sikap negara-negara ASEAN dalam menghadapi RRC di Laut Cina Selatan,

khususnya negara-negara yang terlibat konflik dengannya (Tsu-Sung, 2018). Kelemahan kajian terdahulu mengenai topik seputar Brunei Darussalam dan RRC serta hubungannya dengan konflik Laut Cina Selatan adalah kurangnya kajian yang membahas secara terfokus mengenai konflik antara Brunei Darussalam dan RRC serta sikap Brunei Darussalam secara spesifik terhadap klaim RRC di Laut Cina Selatan. Adapun tujuan dan signifikansi dari tulisan ini adalah untuk mengkaji perihal tersebut sehingga memberikan kontribusi secara akademik dan praktis, mengingat konflik Laut Cina Selatan masih terus berlangsung hingga saat ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis mengambil fokus penelitian pada Brunei Darussalam serta mengkaji secara teoretis mengenai sikap Brunei Darussalam yang tidak menentang klaim RRC di teritorial lautnya, namun sebaliknya justru melakukan kerjasama ekonomi dengan RRC (Hardoko, 2018). Maka pertanyaan penelitian yang diambil adalah **Mengapa Brunei Darussalam tidak menentang klaim RRC di Laut Cina Selatan seperti yang dilakukan oleh Vietnam, Malaysia, Filipina, dan**

Indonesia? Penulis menggunakan teori *Balance of Threat* untuk menganalisis sikap Brunei Darussalam tersebut.

Kerangka Teori

Berdasarkan teori *Balance of Threat*, sistem internasional bersifat anarki dan cenderung tidak ada distribusi kekuatan yang berimbang, oleh sebab itu maka negara akan membuat kerjasama dengan atau melawan kekuatan yang paling mengancam (Walt, 1985:8-9). Kerjasama antar negara tersebut merupakan hasil dari ketidakseimbangan ancaman (*imbalance of threat*) yang terjadi. Hal ini berbeda dengan teori *Balance of Power* yang menyatakan bahwa perilaku negara merupakan hasil dari ketidakseimbangan kekuatan (*imbalance of power*) (Legro & Moravcsik, 1999:36). Lebih lanjut lagi, Walt menyatakan dua macam perilaku negara sebagai respon atas *imbalance of threat*, yaitu *balancing* dan *bandwagoning*.

Menurut Walt, negara akan melakukan *balancing* atau *bandwagoning* ketika adanya ancaman eksternal dari

negara lain. *Balancing* merupakan bentuk kerjasama atau aliansi yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap negara lain yang bukan merupakan ancaman dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan. Sedangkan *bandwagoning* adalah beraliansinya sebuah negara terhadap negara yang merupakan ancaman (Walt, 1985) Terdapat dua penyebab negara melakukan *balancing*, yang pertama adalah ketika negara merasa terancam oleh negara yang memiliki potensi sebagai hegemon. Kemudian negara menyadari bahwa jika mereka beraliansi dengan negara pengancam tersebut, maka negara tersebut akan dikendalikan oleh negara pengancam. Maka strategi yang paling baik adalah beraliansi dengan negara yang belum siap mendominasi, agar tidak terlalu dikendalikan. Kemudian alasan kedua adalah negara lebih memilih untuk bekerjasama dengan negara yang lebih lemah agar memiliki pengaruh lebih. Hal ini disebabkan oleh karena negara yang lemah akan membutuhkan bantuan yang lebih. Sedangkan alasan negara melakukan *bandwagoning* berlawanan dengan *balancing*. *Bandwagoning* dilakukan dengan melakukan aliansi terhadap negara yang

mengancam dan berkedudukan sebagai musuhnya.. Ketika melakukan *bandwagoning*, sebuah negara dituntut untuk mengikuti kehendak negara yang beraliansi (*bandwagon*) dengannya. *Bandwagoning* dilakukan terhadap negara yang kekuatan ancamannya lebih besar (Walt, 1985). Di sisi lain, melakukan *balancing* dianggap menempatkan diri di posisi yang lebih lemah (Walt, 1979).

Lebih lanjut lagi, Walt memberikan tiga kondisi yang membuat negara melakukan *balancing* atau *bandwagoning*. Pertama adalah kondisi negara lemah dan negara kuat. Negara lemah biasanya akan melakukan *bandwagoning*. Hal ini disebabkan oleh karena negara lemah hanya dapat memberikan sedikit sumbangsih dalam sebuah aliansi. Dengan alasan tersebut, maka negara tersebut hanya ingin aman dari ancaman dan kemudian memilih untuk memihak negara yang lebih kuat. Sebaliknya negara kuat akan cenderung melakukan *balancing* karena negara tersebut merasa mampu mengalahkan negara yang memberikan ancaman (Walt, 1979).

Kemudian kondisi yang kedua adalah kemungkinan untuk beraliansi.

Negara mungkin akan melakukan *bandwagoning* ketika situasi tidak memungkinkan untuk membentuk aliansi untuk melakukan *balancing*. Kondisi yang ketiga adalah keadaan perang dan damai. Negara akan lebih memilih *balancing* pada kondisi damai atau awal peperangan untuk mengalahkan negara pengancam. *Balancing* lebih sering terjadi dalam keadaan damai ataupun peperangan, namun *bandwagoning* dilakukan karena alasan yang oportunis bahwa negara yang melakukan *bandwagoning* menganggap negara yang ancamannya lebih besar mungkin akan memenangkan peperangan (Walt, 1987).

Lebih lanjut lagi Walt mengemukakan empat faktor ancaman yang menjadi alasan negara melakukan *balancing* atau *bandwagoning*. Empat faktor ancaman tersebut adalah *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive power*, dan *aggressive intention* (Walt 1987). *Aggregate power* dapat dilihat dari jumlah populasi, luas wilayah, kekuatan ekonomi, dan kekuatan militer. Semakin besar *aggregate power* yang dimiliki suatu negara maka semakin besar ancaman yang dapat ditimbulkan. Kemudian faktor yang kedua adalah

geographic proximity. *Geographic proximity* dapat dilihat dari jarak wilayah negara antara satu dengan yang lainnya. *Geographic proximity* biasanya menggunakan jarak antara ibukota negara. Semakin dekat jarak antara suatu negara dengan negara yang kuat, semakin besar ancaman dan semakin besar tendensi untuk melawan negara tersebut. Selanjutnya adalah *offensive power* yang dapat diukur dari kapabilitas militer. Semakin besar *offensive power*, maka semakin mengancam negara tersebut. Variabel terakhir adalah *aggressive intention*. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang dikeluarkan kepala negara, alasan-alasan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kekuatan, dan juga alasan-alasan untuk menyerang negara lain. Semakin ofensif intensi sebuah negara, maka semakin besar keinginan negara kuat lain untuk melawannya.

Dalam ilmu Hubungan Internasional, *bandwagoning* dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang lebih (Schweller, 2004:168). Alasan negara bekerjasama dengan negara lain tersebut dilatarbelakangi oleh kemungkinan lebih

besar yang dimiliki negara tersebut untuk menang dalam sebuah konflik (Marks, 2011:92). Selain itu, *bandwagoning* dilakukan sebuah negara lemah dengan negara yang dianggap lebih kuat dan mengancam, sehingga membuat negara yang melakukan *bandwagoning* terlindungi oleh ancaman (Waltz, 1979:126). Metode penelitian yang akan digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisa fenomena yang *tangible* dan relatif statis sehingga hasilnya berupa angka-angka (Leng,2002:118). Metode kuantitatif fokus kepada data statistik atau frekuensi dari permasalahan yang sedang diteliti. Fenomena yang diukur dalam penelitian ini adalah empat faktor ancaman dalam teori *Balance of Threat* yang menjadi indikator untuk mengidentifikasi sikap Brunei Darussalam terhadap RRC, yaitu *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive power*, dan *aggressive intention*.

Pembahasan

Dalam bagian Pembahasan ini, Penulis mengidentifikasi sikap Brunei

Darussalam dalam menyikapi klaim RRC di Laut Cina Selatan berdasarkan empat faktor ancaman, yaitu *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive power*, dan *aggressive intention* serta tiga kondisi negara dalam teori *Balance of Threat*. Penulis juga menjadikan empat faktor ancaman tersebut sebagai indikator perbandingan dengan Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia sebagai negara-negara yang juga bersengketa dengan RRC di Laut Cina Selatan. Kemudian hasil analisis tersebut akan Penulis gunakan untuk mengidentifikasi perbedaan sikap Brunei Darussalam dengan empat negara tersebut terhadap klaim RRC. Hasil analisis tersebut akan disimpulkan untuk mengidentifikasi sikap Brunei Darussalam termasuk ke dalam *balancing* atau *bandwagoning*, sehingga hasil analisis tersebut akan menjawab pertanyaan penelitian.

Pengaruh Faktor Ancaman Terhadap Sikap Brunei Darussalam

Aggregate Power

Aggregate Power dapat dinilai dari jumlah populasi, luas wilayah, kekuatan ekonomi, dan kekuatan militer

(Walt, 1987). Jika dilihat dari jumlah populasi, RRC memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,4 miliar jiwa. Sedangkan Vietnam memiliki jumlah penduduk sebanyak 96.491.146 jiwa, Malaysia memiliki sekitar 32.042.458 jiwa, Filipina memiliki sekitar 106.512.074 jiwa, dan Indonesia memiliki sekitar 267.002.779 jiwa (*The Spectator Index*, 2018). Jika jumlah populasi keempat negara tersebut digabungkan, maka jumlah populasinya adalah sekitar 500 juta jiwa, separuh dari jumlah populasi RRC.

Sedangkan jika diukur dari luas wilayah, RRC memiliki luas wilayah sebesar 9.596.961-kilometer persegi. Sebagai perbandingan, Vietnam memiliki luas wilayah sebesar 331.210-kilometer persegi, Malaysia sebesar 330.803-kilometer persegi, Filipina sebesar 300.000-kilometer persegi, dan Indonesia sebagai 1,904,569 kilometer persegi. Jika luas wilayah keempat negara tersebut digabungkan, maka luasnya adalah 2.866.582-kilometer persegi. Luas wilayah RRC lebih besar dibandingkan gabungan antara Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia.

Kemudian jika dilihat dari perbandingan kekuatan militer, RRC memiliki kekuatan militer yang lebih besar dibandingkan Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia meskipun dalam beberapa tahun terakhir terdapat tren peningkatan kekuatan angkatan laut keempat negara tersebut. Tercatat bahwa angkatan laut Vietnam telah menambah empat kapal fregat *Gepard* tipe 3.9 buatan Rusia pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2017, Rusia membantu Vietnam dalam memodernisasi sistem pertahanan misil angkatan laut di kapal korvet *Moiniya* dan *Tarantula* milik angkatan laut Vietnam. Selain itu, Vietnam juga memiliki roket langka yang dibeli dari Rusia, Rubezh 4K51, sebagai misil pertahanan laut yang mampu jangkauannya dapat mencapai hingga Kepulauan Spratly dan Paracels. Sebagai catatan, saat ini Vietnam adalah negara dengan armada angkatan laut terkuat di ASEAN (Aqwam Hanifam, 2017).

Peningkatan kekuatan angkatan laut juga dilakukan oleh Malaysia yang membeli dua kapal fregat F2000 dari Inggris dan enam kapal korvet *Gowind Class* dari Perancis serta dua kapal selam jenis *Scorpene* dari Perancis pada tahun

2014 (Robinsar Hutabarlian, 2018). Kemudian Filipina juga termasuk negara yang paling agresif meningkatkan kekuatan armada lautnya, sehubungan dengan keadaannya yang paling terancam dalam sengketa Laut Cina Selatan. Hal ini terkait dengan putusan Pengadilan Tetap Arbitrase (*Permanent Court of Arbitration*) di Deen Haag, Belanda tanggal 12 Juli 2016 memenangkan gugatan Filipina atas RRC terkait sengketa kedua negara di Laut Cina Selatan, namun RRC justru mengeluarkan buku putih yang pada intinya menolak untuk menaati putusan *Permanent Court of Arbitration* dan tetap bersikukuh dengan klaim historisnya atas *nine dashed line* (Veeramalla, 2018). Dalam kurun waktu antara tahun 2013 hingga 2015, Filipina telah mendatangkan belasan kapal fregat dan korvet dari Amerika Serikat, Italia, dan Jepang, meski semuanya merupakan armada bekas (Aqwam Hanifam, 2017).

Hal sama juga dilakukan oleh Indonesia. Pada tahun 2017, Indonesia membeli satu kapal selam *Chang Bogo-Class* dari Korea Selatan. Pada tahun 2018, terdapat dua kapal selam bertipe sama yang dibeli oleh Indonesia. Selain

Chang Bogo-Class, Indonesia juga berencana membeli dua belas kapal selam tipe *Kilo* dari Rusia (Aqwam Hanifam, 2017). Untuk memperkuat alutsista TNI AL, Indonesia sudah mendatangkan tiga unit *Light Fregart Bung Tomo Class* dan banyak KCR-40 dan KCR-60 buatan lokal. Selain itu, Indonesia juga sudah memesan dua unit PKR Sigma-10514 dengan opsi sampai sepuluh unit dari Belanda. Selain itu, juga ada pemesanan tiga unit kapal selam DSME-209 dari Korea Selatan (Robinsar Hutabarlion, 2018) serta yang terbaru adalah peluncuran kapal selam Alugoro pada tahun 2020.

Secara peringkat, RRC juga berada jauh di atas empat negara tersebut. Berdasarkan statistik terbaru indeks *Global Fire Power 2019*, RRC menempati peringkat ke-3 di dunia, di bawah Amerika Serikat dan Rusia. Sementara itu, Vietnam berada di peringkat ke-20, Malaysia peringkat ke-44, Filipina peringkat ke-52, dan Indonesia peringkat ke-15. Secara kekuatan militer, indeks ini membuktikan militer RRC berada jauh di atas Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia.

Kemudian indikator selanjutnya dari *aggregate power* adalah kekuatan ekonomi. Jika diukur dari segi kekuatan ekonomi, maka RRC juga berada di atas Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Berdasarkan *Gross Domestic Product (GDP)*, RRC berada di urutan ke-2 di dunia dengan GDP sebesar 14,092.51 USD. Sebagai perbandingan, Vietnam berada di peringkat ke-49 dunia dengan GDP sebesar 240.78 USD, Malaysia di peringkat ke-36 dengan GDP sebesar 364.96 USD, Filipina di peringkat ke-39 dengan GDP sebesar 332.45 USD, dan Indonesia berada di peringkat ke-16 dengan GDP sebesar 1.074.97 USD (*International Monetary Fund World Economic Outlook*, 2018).

Jika dilihat dari *aggregate power*, baik dari segi jumlah penduduk, luas wilayah, kekuatan militer, dan kekuatan ekonomi, maka RRC mengungguli Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Dengan demikian, RRC menjadi pihak yang lebih mengancam bagi Brunei Darussalam sehingga keunggulan *aggregate power* yang dimiliki oleh RRC tersebut menjadi salah

satu alasan bagi Brunei Darussalam untuk tidak menentang klaim RRC.

Kebijakan yang tidak bersifat konfrontatif tersebut merupakan hasil pertimbangan akan kapasitas pertahanan yang kurang memadai dan kondisi sumber daya migas yang diprediksi akan segera habis dalam waktu dekat. Padahal, hasil dari sektor migas menyumbang 90% dari total pendapatan hasil ekspor Brunei Darussalam, sehingga menjalin kerjasama dengan RRC menjadi esensial bagi Brunei Darussalam (Heydarian 2012) karena RRC merupakan pasar potensial bagi Brunei Darussalam sebagai alternatif sumber pendapatan yang bergantung pada migas (Heydarian, 2012).

Berdasarkan fakta yang ada, Brunei Darussalam tengah dilanda krisis ekonomi yang disebabkan oleh jatuhnya harga minyak dunia. Krisis ekonomi yang terjadi di Brunei Darussalam disebabkan oleh ketergantungan Brunei Darussalam pada hasil migasnya, sehingga ketika harga minyak dunia jatuh, maka Brunei Darussalam mengalami resesi (Erwan Handoko, 2018). Krisis ekonomi tersebut membuat Brunei Darussalam tidak mampu mengembangkan

perekonomiannya dan membuat negara tersebut, sehingga mengakibatkan Brunei Darussalam meminta bantuan RRC untuk menanamkan modalnya untuk mengangkat perekonomian negara (Erwan Handoko, 2018). Krisis ekonomi yang dialami Brunei Darussalam serta kerjasama ekonomi dengan RRC membuat negara tersebut berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk menentang klaim RRC dan meningkatkan kekuatan militernya seperti yang dilakukan oleh Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia.

Geographic Proximity

Dalam hal kedekatan wilayah, Brunei Darussalam lebih dekat kepada Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia dibandingkan dengan RRC. Namun dalam sengketa Laut Cina Selatan, *nine dashed line* yang dibuat oleh RRC melanggar Zona Ekonomi Eksklusif Brunei (ZEE) Darussalam, serta melintasi batas-batas wilayah Brunei Darussalam yang dekat dengan ibukota Brunei Darussalam, seperti wilayah utara pulau Kalimantan. *Nine dashed line* yang dibuat RRC merupakan ancaman bagi Brunei Darussalam karena terletak dekat dengan

wilayahnya. Dengan demikian, dari segi *geographic proximity*, RRC merupakan ancaman bagi Brunei Darussalam, meskipun jarak antara Brunei Darussalam dengan RRC lebih jauh dibandingkan jarak Brunei Darussalam dengan Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia.

Offensive Power

Seperti yang dinyatakan oleh Walt mengenai *offensive power* yang menyatakan bahwa semakin besar kekuatan militer yang dimiliki oleh suatu negara, maka negara tersebut dianggap menjadi ancaman (Walt, 1987). Dalam hal ini, maka alasan Brunei Darussalam tidak menentang klaim RRC di teritori laut Brunei Darussalam adalah karena RRC memiliki kekuatan militer yang lebih besar dibandingkan Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Bahkan jika kekuatan militer Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia digabungkan, kekuatan militer empat negara tersebut masih belum mampu menyamai dan menandingi kekuatan militer RRC yang merupakan menempati urutan ke-3 kekuatan militer terbesar di dunia, di

bawah Amerika Serikat dan Rusia, seperti yang Penulis telah paparkan sebelumnya.

Tabel 1 RRC Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia Combined

<i>Naval Assets</i>	714	466
<i>Aircraft Carriers</i>	1	0
<i>Frigates</i>	50	24
<i>Destroyers</i>	29	0
<i>Corvettes</i>	39	54
<i>Submarines</i>	73	11
<i>Patrol Vessels</i>	220	175
<i>Mine Warfare</i>	29	24
Total	1.115	754

(Global Fire Power, 2018)

Dalam hubungannya dengan sengketa di Laut Cina Selatan, tabel di atas menunjukkan bahwa dari segi *offensive power*, kekuatan angkatan laut RRC berada di atas kekuatan angkatan laut gabungan Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa oleh karena RRC memiliki *offensive power* yang jauh lebih besar dibandingkan Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia, maka RRC

merupakan ancaman bagi Brunei Darussalam sehingga Brunei Darussalam lebih memilih untuk tidak menentang klaim RRC seperti yang dilakukan oleh Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Hal ini didukung pula oleh statistik dalam tabel di atas yang menyatakan bahwa sekalipun kekuatan angkatan laut Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia digabungkan, namun kekuatan angkatan laut keempat negara tersebut tetap tidak mampu menyaingi kekuatan angkatan laut RRC, sehingga bekerja sama dengan RRC dibanding dengan Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia dianggap sebagai pilihan yang rasional.

Aggressive Intention

Seperti yang dikemukakan oleh Walt mengenai *aggressive intention*, maka elemen-elemen yang termasuk adalah pernyataan yang dikeluarkan kepala negara, alasan-alasan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kekuatan, dan juga alasan-alasan untuk menyerang negara lain. Dari pernyataan oleh kepala negara, Presiden RRC, Xi

Jinping, menegaskan bahwa RRC tidak akan menghentikan klaimnya di Laut Cina Selatan. Adapun yang menjadi alasan bagi Xi Jinping adalah bahwa Laut Cina Selatan merupakan teritori warisan nenek moyang yang akan selalu diperjuangkan oleh RRC (Rizkyan Adiyudha, 2018).

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Xi Jinping tersebut membuat *aggressive intention* yang dimiliki oleh RRC menjadi jelas. Kemudian hal tersebut menjadi alasan bagi Brunei Darussalam menganggap RRC sebagai ancaman sehingga Brunei Darussalam, mengingat pernyataan Xi Jinping yang menegaskan bahwa RRC tidak akan klaimnya di Laut Cina Selatan. Hal ini memenuhi unsur “alasan-alasan untuk menyerang negara lain” seperti yang dikemukakan oleh Walt. Berdasarkan analisa Penulis, pernyataan Xi Jinping yang menunjukkan besarnya *aggressive intention* yang dimiliki oleh RRC, terlebih didukung oleh tiga faktor ancaman lain seperti yang telah terlebih dahulu Penulis paparkan, membuat Brunei Darussalam memilih untuk tidak menentang klaim RRC di Laut Cina Selatan.

Kemudian jika ditinjau dari tiga kondisi negara yang dikemukakan oleh Walt, maka Brunei Darussalam tidak menentang klaim RRC di teritori lautnya karena jika kedua negara dibandingkan, maka Brunei Darussalam merupakan negara lemah. Dan menurut Walt, negara lemah akan cenderung melakukan *bandwagoning* terhadap negara kuat. Selain kekuatan ekonomi yang lemah karena resesi, jika dikaitkan dengan sengketa di Laut Cina Selatan maka kekuatan militer Brunei Darussalam juga berada jauh di bawah kekuatan militer RRC. Hal ini membuat Brunei Darussalam menganggap bahwa peningkatan kekuatan militer dan sikap menentang klaim RRC seperti yang dilakukan oleh Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia merupakan pilihan yang tidak bijak karena kekuatan militer RRC lebih besar dari Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia, selain karena krisis ekonomi yang sedang dialami oleh Brunei Darussalam.

Jika ditinjau dari kondisi kedua, yaitu kemungkinan untuk beraliansi (*balancing*), maka jika menilik pengertian

balancing menurut Walt yang menyatakan bahwa *balancing* merupakan bentuk kerjasama atau aliansi yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap negara lain yang bukan merupakan ancaman sekaligus musuh dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan. Dalam hal ini, RRC merupakan ancaman untuk Brunei Darussalam dan berdasarkan kapabilitas militer serta ekonomi, Brunei Darussalam memposisikan dirinya sebagai negara lemah, sehingga Brunei Darussalam lebih memilih untuk tidak menentang klaim RRC. Kemudian jika meninjau kemungkinan untuk beraliansi atau bekerja sama dengan Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia sebagai sesama negara yang bersengketa dengan RRC, maka Penulis berkesimpulan bahwa aliansi tidak memungkinkan untuk dilakukan. Hal ini menilik pada fakta bahwa baik Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia belum menunjukkan niat untuk membentuk sebuah aliansi menghadapi RRC (Darmawan & Mahendra, 2018). Namun sebaliknya, keempat negara tersebut justru lebih bersikap menentang klaim RRC. Hal ini dapat dilihat dari sikap resmi pemerintah keempat negara tersebut dan peningkatan

kekuatan angkatan laut yang telah terlebih dahulu dibahas.

Kemudian sikap Brunei Darussalam ditinjau secara lebih lanjut pada kondisi ketiga, yaitu sikap negara lemah (*small power*) yang oportunistik (Mao Thang, 2018). Seperti telah dipaparkan sebelumnya, bahwa Brunei Darussalam tengah mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh anjloknya harga minyak bumi di dunia. Hal ini menyebabkan Brunei Darussalam kehilangan sumber pendapatan utamanya. Kemudian jika faktor tersebut digabungkan juga dengan keadaan konflik di Laut Cina Selatan, Brunei Darussalam menganggap bahwa RRC sebagai negara *great power* di kawasan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk memenangkan sengketa Laut Cina Selatan jika dilihat dari perbandingan kekuatan militernya, khususnya angkatan laut, dengan Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Bahkan jika keempat negara tersebut menggabungkan kekuatan militernya, RRC tetap memiliki kekuatan yang lebih besar. Hal ini membuat Brunei Darussalam memosisikan RRC sebagai negara kuat sekaligus musuh dan

membuat Brunei Darussalam lebih memilih untuk tidak menentang klaim RRC.

Adapun klimaks dari sikap Brunei Darussalam tersebut adalah kesepakatan Xi Jinping dan Sultan Hassanal Bolkiah melalui kedatangan Xi Jinping ke Brunei Darussalam pada bulan November 2018 untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi bilateral, di antaranya mendorong kerja sama pada kilang minyak Hengyi Industries Sdn Bhd dan pabrik petrokimia di Pulau Muara Besar, serta mempromosikan "Koridor Ekonomi Brunei-Guangxi", dan memperkuat komunikasi dan kerjasama teknis di bidang pertanian, makanan halal dan budidaya (Eka Yudha Saputra, 2018). Kesepakatan ini merupakan bentuk *bandwagoning* yang dilakukan oleh Brunei Darussalam, padahal pada saat itu konflik LCS masih berlangsung dan Brunei Darussalam merupakan salah satu negara yang berkonflik dengan RRC di LCS.

Simpulan

Berdasarkan analisa yang telah dipaparkan oleh Penulis, maka simpulan yang dapat diambil adalah bahwa Brunei

Darussalam melakukan *bandwagoning* kepada RRC karena RRC merupakan pihak yang berkedudukan sebagai negara kuat sekaligus musuh Brunei Darussalam dalam konflik LCS, sehingga Brunei Darussalam tidak memiliki opsi lain untuk menghadapi RRC selain bekerja sama dan melakukan *bandwagoning*. Adapun *bandwagoning* yang dilakukan Brunei Darussalam adalah melalui kerjasama ekonomi dan investasi yang disepakati oleh pemimpin kedua negara.

Sikap Brunei Darussalam terhadap RRC juga didukung oleh tiga kondisi negara dan empat faktor ancaman dalam teori *Balance of Threat*. Berdasarkan tiga kondisi negara Walt, Brunei Darussalam memosisikan dirinya sebagai negara lemah, dan negara yang lemah akan cenderung melakukan *bandwagoning* terhadap negara kuat. Adapun alasan Brunei Darussalam menempatkan posisinya sebagai negara lemah adalah karena kekuatan ekonomi Brunei Darussalam yang sedang terpuruk karena resesi. Posisi Brunei Darussalam tersebut didukung oleh empat faktor ancaman, dimana RRC lebih unggul dalam *aggregate power*, *geographic proximity*,

offensive power, dan *aggressive intention*. Secara *aggregate power*, RRC lebih unggul segi dari jumlah populasi, luas wilayah, kekuatan ekonomi, dan kekuatan militer dibandingkan dengan Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia, bahkan jika elemen-elemen *aggregate power* dari keempat negara tersebut digabungkan. Kemudian dari segi *geographic proximity*, klaim *nine dashed line* yang dekat dengan wilayah serta ibu kota Brunei Darussalam merupakan ancaman bagi Brunei Darussalam, meskipun jarak antara Brunei Darussalam dengan RRC lebih jauh dibandingkan jarak Brunei Darussalam dengan Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Lebih lanjut lagi, dari segi *offensive power*, kekuatan militer yang dimiliki oleh RRC lebih kuat jika dibandingkan dengan gabungan kekuatan Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Hal ini didukung dengan *aggressive intention* yang dimiliki RRC dengan pernyataan presiden Xi Jinping yang menegaskan tidak akan berhenti mewujudkan klaim atas wilayah Laut Cina Selatan.

Penulis berargumen bahwa faktor-faktor ancaman yang telah dipaparkan

tersebut menjadi alasan Brunei Darussalam tidak menentang klaim RRC di Laut Cina Selatan meski wilayah lautnya terkena klaim *nine dashed line*. Selain itu, Penulis beranggapan bahwa Brunei Darussalam memilih melakukan *bandwagoning* kepada RRC karena ukuran kapabilitas dan kapasitas kekuatan yang sangat tidak berimbang antara Brunei Darussalam serta Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia dengan RRC. Hal ini ditambah dengan kondisi perekonomian Brunei Darussalam yang terpuruk sehingga tidak menentang klaim RRC serta melakukan *bandwagoning* akan lebih menguntungkan dan merupakan keputusan yang rasional bagi Brunei Darussalam. Adapun argumen Penulis yang menyatakan bahwa Brunei Darussalam melakukan *bandwagoning* didasarkan pada definisi *bandwagoning* menurut Walt, yaitu aliansi atau kerjasama yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang mengancam dan berkedudukan sebagai musuh. Oleh karena itu, maka kerjasama perdagangan dan investasi yang dilakukan Brunei Darussalam terhadap RRC yang merupakan musuhnya dalam konflik LCS merupakan bentuk *bandwagoning*.

Selain itu, keunggulan *power* relatif yang dimiliki RRC juga menjadi alasan Brunei Darussalam tidak menentang klaim RRC serta melakukan *bandwagoning* terhadap RRC. Hal ini disebabkan oleh karena Vietnam, Malaysia, Filipina, atau Indonesia tidak ada yang memiliki *power* melebihi RRC, sehingga jawaban atas pertanyaan penelitian adalah bahwa bagi Brunei Darussalam, bersikap seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, atau Indonesia dengan menentang klaim RRC merupakan tindakan yang sia-sia. Dengan demikian, tidak menentang klaim RRC dan melakukan *bandwagoning* adalah langkah terbaik yang dapat ditempuh oleh Brunei Darussalam. Dalam hal ini, RRC berkedudukan sebagai negara kuat sekaligus musuh Brunei Darussalam dalam konflik LCS, sehingga tidak ada pilihan bagi Brunei Darussalam selain bekerja sama dalam bentuk *bandwagoning* dengan RRC.

Daftar Pustaka

Adiyudha, Rizkian., dan Nursalikhah, Ani.
(2018). *Xi Jinping Tak Akan Angkat Kaki Dari Laut Cina Selatan*. Diambil dari <https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/pb0pwq366>.

- BBC Indonesia. (2016). *Cina kembali tegaskan klaim atas wilayah di Laut Cina Selatan*. Diambil dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160712_dunia_reaksi_lautcina_selatan
- Burke, Anthony (2012). *Security*. In Richard Devetak, Anthony Burke, Jim George (eds), *An Introduction to International Relations*, pg. 160-171, Cambridge: CUP.
- Buzzan, Barry & Weaver, Ole. (2003) *Region and Power The Structure in International Security*. Cambridge University Press : Cambridge, 2003.
- Darmawan, Arief & Mahendra, Lady. (2018). *Isu Laut Tiongkok Selatan: Negara-negara ASEAN Terbelah Menghadapi Tiongkok*. E-Journal Universitas Airlangga.
- Djelantik. (2015). *Asia-Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi Antarkawasan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Donnelly, Jack. (2008). *The Ethics of Realism, in Christian Reus-Smit, Duncan Snidal (eds.)*. The Oxford Handbook of International Relations, Oxford University Press p. 150
- Gramsci, Antonio. (1999). *Selections from the Prison Notebooks*. London: The Electric Book Company Ltd.
- Griffiths, Martin & Terry O'Callaghan. (2002). *International Relations: The Key Concepts*. London:Routledge.
- Hanifam, Aqwam. (2017). *ASEAN Mempertahankan Armada Bersiaga Hadapi Cina*. Diambil dari <https://tirto.id/asean-mempertahankan-armada-bersiaga-hadapi-cina-cxP5>.
- Hardoko, Ervan. (2018). *Tak Bisa Lagi Andalkan Minyak, Brunei Mulai Berpaling ke China*. Diambil dari <https://internasional.kompas.com/read/2018/11/19/18480641/tak-bisa-lagi-andalkan-minyak-brunei-mulai-berpaling-ke-china>.
- Hasan, Akhmad Muawal. (2018). *Cadangan Migas Hampir Habis, Brunei Kian Mesra Dengan China*. Diambil dari <https://tirto.id/cadangan-migas-hampir-habis-brunei-kian-mesra-dengan-cina-cGCA>
- Hutabalian, Robinsar. (2018). *Indonesia Dalam Tren Modernisasi Alutsista Angkatan Laut Negara Kawasan Laut China Selatan*. Diambil dari <https://www.kompasiana.com/robinsarhutabalian6845/5b7042556ddcae2cd17e23b2/indonesia-dalam-tren-modernisasi-alutsista-angkatan-laut-negara-kawasan-laut-china-selatan>.
- Haller-Trost. (1994). *International Law and the History of the Claims to the Spratly Islands*. Washington: American Enterprise Institute.
- International Monetary Fund World Economic Outlook. (2018). Diambil dari <http://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). Diambil dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/halaman_list_lainnya/laut-china-selatan

- Kusumadewi, Anggi. (2016). *Kemelut Indonesia-Cina di Natuna sepanjang 2016*. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160621100151-20-139694/kemelutindonesia-china-di-natuna-sepanjang-2016> (accessed on February 6th 2020).
- Legro, Jeffrey & Moravcsik, Andrew. (1999). *Is Anybody Still a Realist?*. Massachusetts: Harvard College.
- Marks, Michael. (2011). *Metaphors in International Relations History*. Berlin: Springer.
- Mearsheimer, John. (2011). *Why Leaders Lie: The Truth about Lying in International Politics*. New York: Oxford University Press.
- Morgenthau, Hans. (1993). *Politics Among Nations: Struggle for Power and Peace*. Boston: McGraw-Hill.
- Patria, N., & Arief, A. (2015). *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Perwita, Anak Agung Banyu & Yanyan Mochamad Yani. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Salman, Munthe. (2015). *Strategi Implementasi Sistem Ekonomi Islam dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 1 No. 2.
- Sands, Gary. (2016). *Brunei, Silent Claimant in the South China Sea*. Diambil dari <https://foreignpolicyblogs.com/2016/04/28/brunei-silent-claimant-south-china-sea/>
- Saputra, Eka Yudha. (2018). *Kunjungi Brunei Darussalam, Xi Jinping Perkuat Kerjasama Ekonomi*. Diambil dari <https://dunia.tempo.co/read/1147802/kunjungi-brunei-darussalam-xi-jinping-perkuat-kerja-sama-ekonomi/full&view=ok>
- Schweller, Randal. (2004). *Unanswered Threats: A Neoclassical Realist Theory of Underbalancing*. *International Security*. 29(2), 159-201.
- Sebayang, Rehia. (2020). *Ramai-ramai Negara ASEAN Geram Karena Klaim Laut China*. Diambil dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200106140946-4-127958/ramai-ramai-negara-asean-geram-karena-klaim-laut-china>
- Storey & Cheng-Yi Lin. (2016). *The South China Dispute: Navigating Diplomatic and Strategic Tensions*. ISEAS.
- Thang, Mao. (2018). *Small States and Hegemonic Competition in Southeast Asia: Pursuing Autonomy, Security and Development amid Great Power Politics*. Routledge.
- Trading Economics Index*. (2018). *GDP per capita*. Diambil dari <https://tradingeconomics.com/>.
- Toft, Peter. (2005). *John J. Mearsheimer: an offensive realist between geopolitics and power*. University of Copenhagen.

Tsu-Sung. (2018). *South China Sea Disputes: The Historical, Geopolitical, and Legal Studies*. World Scientific.

Veeramalla, Anjaiah. (2018) *Dua Tahun Berlalu China Masih Mengabaikan Keputusan PCA tentang LCS*.
<https://kompasiana.com/anjaiah/5b456c7cdd0fa86ad96eba83/dua-tahun-berlalu-china-masih-mengabaikan-keputusan-pca-tentang-lcs?page=all>

Walt, Stephen. (1985). *Alliance Formation and the Balance of World Power*. Massachusetts: The MIT Press.

Walt, Stephen. (1987). *The Origin of Alliance*. New York: Cornell University Press.

Waltz, Kenneth. (1979). *Theory of International Politics*. Boston: Addison-Wesley Publishing Company.

Yani, Yanyan Mochamad. (2010). *Kepentingan Strategis China di Kawasan Asia Timur Pasca Perang Dingin dalam Persepektif Offensive Realism John J. Mearsheimer*.
http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2010/01/makna_pengembangan_kekuatan_militer_China.pdf